

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori	17
2.1.1 Hukum Laut (<i>Law of the Sea</i>).....	17
2.1.2 Kepastian Hukum	24
2.1.3 Monisme dan Dualisme	34

2.2 Tinjauan Konseptual	40
2.2.1 Konvensi Hukum Laut (<i>Law of the Sea Conference/ LOSC</i>) dalam Perspektif Kepentingan Negara-Negara Berkembang 40	
2.2.2 Organisasi Otoritas Dasar Laut International (International Seabed Authority/ ISA).....	43
2.2.3 Penambangan Dasar Laut Dalam (<i>Deep Seabed Mining/</i> DSM)	46
2.2.4 Regulasi Pertambangan (<i>Mining Code</i>) oleh Otoritas Dasar Laut International (<i>International Seabed Authority/ ISA</i>). 50	
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Jenis Data	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	59
3.4 Jenis Pendekatan	59
3.5 Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
4.1 Hasil Penelitian tentang Kepastian Hukum Pelaksanaan <i>Deep</i> <i>Seabed Mining</i> Akibat Keterlambatan Penyusunan <i>Mining Code</i> dan Keterlibatan Pemerintah Indonesia	62
4.1.1 Aturan Dua Tahun dalam Rezim LOSC dan Kegiatan DSM	62
4.1.2 Keterlibatan Indonesia terhadap Rezim LOSC dan Kegiatan DSM	72
4.2 Analisis Kepastian Hukum Pelaksanaan DSM Akibat Keterlambatan Penyusunan <i>Mining Code</i>	74
4.2.1 Pentingnya Penyelesaian <i>Mining Code</i> oleh ISA	75

4.2.2 Analisis Unsur Kepastian Hukum dalam Kewenangan ISA dan Produk Normatifnya.....	79
4.2.3 Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan <i>Mining Code</i> oleh ISA	85
4.2.4 Analisis Bentuk-Bentuk Hukum dari Penundaan Regulasi	87
4.2.5 Akibat Hukum dari Keterlambatan Penyusunan <i>Mining Code</i> oleh ISA.....	90
4.2.6 Dampak Sistemik Keterlambatan <i>Mining Code</i> terhadap Operasionalisasi dan Struktur Hukum Internasional (<i>Legal Uncertainty vs International Legal Framework</i>).....	102
4.3 Analisis Strategi Pemerintah Indonesia Menyikapi Keterlambatan Penyusunan <i>Mining Code</i>	104
4.3.1 Analisis Regulasi Nasional Terkait DSM	104
4.3.2 Analisis Sikap Indonesia di Forum Internasional.....	119
4.3.3 Analisis Strategi Pemerintah Indonesia	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	137
5.1 Kesimpulan	137
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Aplikasi Elemen Radbruch dalam Kerangka ISA	81
Tabel 4.2	Perbandingan Kepentingan dan Risiko Negara Pihak dan Non-Pihak terhadap Rezim DSM	90
Tabel 4.3	Pemetaan Kepastian Hukum Eksploitasi Sumber Daya Mineral Laut Dalam: Perspektif Negara Pihak dan Non-Pihak	99
Tabel 4.4	Blok Negara-Negara Moderat Yang Mendorong Pendekatan Kompromistis Terhadap Sistem Akses Dasar Laut.	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Timeline Penyusunan <i>Mining Code</i> oleh ISA	51
--	----

